



Menjemput

Musim Semi

TRANSFORMASI DAN
REFORMASI EKONOMI
2019-2024



Ahmad Erani Yustika
Unggul Heriqbaldi
Fajar B. Hirawan

QOU VADIS PERTANIAN

Oleh:

Unggul Heriqbaldi dan Dwindi Rahman

Pendahuluan

Pertanian adalah sektor ekonomi terbesar di Indonesia, jika dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Pada awal 2019, setidaknya terdapat 38,1 juta orang yang bekerja di sektor ini atau lebih dari dua kali jumlah yang bekerja di industri manufaktur. Sektor pertanian juga terus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat miskin di perdesaan. Oleh karena itu, membahas sektor pertanian berarti juga memperbincangkan kondisi pekerja di sektor pertanian dan sekaligus mendiskusikan bagaimana perubahan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu. Tampaknya dari dua hal ini saja dapat diambil kesimpulan mengapa kebijakan pemerintah di sektor pertanian begitu penting dan mendasar.

Jika dilihat dari sisi makro ekonomi, peran sektor pertanian memang semakin menurun dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2008, pangsa *output* sektor pertanian dalam PDB masih berada di level 14%. Sedangkan data pada 2018 memperlihatkan pangsa *output* sektor pertanian menurun menjadi 13%. Penurunan ini tidak hanya dialami sektor pertanian, namun juga industri pengolahan yang pangasanya turun dari 27% menjadi 22%. Penurunan tajam ini membuat banyak pihak berpendapat bahwa Indonesia sedang mengalami fase deindustrialisasi. Di sektor tersier atau jasa,

pangsa *output*-nya justru meningkat dari 51% menjadi 57%. Mungkin ini adalah masa ketika ekonomi Indonesia sudah beranjak dan bergantung pada sektor jasa, setidaknya jika dilihat dari perspektif pangsa nilai tambah sektoral dalam PDB.

Perubahan struktural dalam ekonomi tersebut, tampaknya juga terjadi di ranah yang lebih mikro yaitu sektor. Jika kembali pada sektor pertanian, pada 2008 subsektor paling besar dalam pangsa *output* adalah pangan. Subsektor ini menguasai lebih dari 50% pangsa *output* sektor pertanian. Subsektor perkebunan pada saat itu masih memiliki pangsa 16%, sama dengan pangsa subsektor perikanan. Subsektor hortikultura pada saat itu belum dihitung kontribusinya karena belum masuk dalam klasifikasi subsektor. Pada 2018, semua subsektor ini mengalami perubahan cukup besar. Subsektor pangan menurun pangsa menjadi 23%, sebuah penurunan yang signifikan. Selanjutnya, seperti dapat diperkirakan, subsektor perkebunan seperti kelapa sawit mengalami pertumbuhan pesat akibat tingginya harga komoditas sebelum 2010. Pangsa subsektor ini meningkat menjadi 30% atau hampir 2 kali dari level 2008. Subsektor lain, yang juga tumbuh menjadi besar adalah hortikultura. Subsektor ini memiliki pangsa *output* 11% dari total *output* pertanian.

Menilai Kebijakan Pertanian

Dari sisi kebijakan pertanian, sebetulnya tidak ada perubahan signifikan selama beberapa dekade ke belakang. Seperti kebijakan sektoral sebelumnya, sasaran strategis sektor pertanian 2015-2019 masih ditujukan pada swasembada padi, jagung, kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula. Kecenderungan menuju tujuan swasembada muncul kembali ke permukaan pascareformasi (Hamilton-Hart, 2019). Bahkan, muncul dengan komoditas yang lebih banyak. Sasaran ini cukup problematik, jika melihat sumber daya yang dimiliki pemerintah melalui kapasitas fiskalnya. Tampaknya pemerintah harus berani untuk menetapkan prioritas komoditas mana yang akan didahulukan karena semakin banyak pilihan komoditas berarti semakin banyak sumber daya yang harus dialokasikan. Bahkan, tidak sedikit pemikiran kritis di masyarakat yang memandang apakah sebaiknya pemerintah fokus pada ketahanan pangan daripada swasembada pangan. Apa artinya swasembada pangan jika beban berat harus ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk harga komoditas yang tinggi. Beberapa penelitian memperlihatkan dampak dari semakin terbatasnya akses masyarakat pada pangan akibat harga yang tinggi (lihat misalnya: de Hoyos

dan Medvedev, 2011; de Pee *et al.*, 2010; Ivanic dan Martin, 2008; McCulloch, 2008; Skoufias, Tiwari, dan Zaman, 2012; Warr dan Yusuf, 2014).

Harus diakui untuk produk pangan seperti beras, harga pasar di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Pada November 2017, harga beras di Thailand USD0,35 (Rp4.725) per kg dan di Vietnam USD0,36 (Rp4.860) per kg. Sementara itu harga beras di Indonesia dengan kualitas medium mencapai USD0,79 (Rp10.665) per kg (Katadata, 2018). Implikasi dari permasalahan di atas adalah perlunya reorientasi kebijakan pertanian pemerintah menuju sektor pertanian yang lebih efisien. Investasi besar pemerintah dalam alat dan mesin pertanian (Alsintan) tidak akan banyak berdampak pada peningkatan efisiensi pertanian selama upaya konsolidasi lahan tidak menampakkan hasil karena skala ekonomi tidak mengalami perubahan.

Rendahnya *return* di sektor pertanian pun akhirnya tidak memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukan inovasi dalam teknologi pertanian, sehingga penerapan teknologi dalam pertanian tampak tidak berkembang. Ditambah lagi investasi penelitian dan pengembangan yang dilakukan pemerintah seolah tidak jelas arah dan keberlanjutannya sehingga dampaknya pada sektor pertanian terutama pada aspek efisiensi tidak pernah muncul ke permukaan. Data terakhir yang tersedia memperlihatkan proporsi biaya *research and development* Indonesia terhadap PDB 2013 adalah 0,085%. Angka ini jauh dibandingkan dengan Malaysia yang ada di level 1,2% dan Thailand 0,44% (Bank Dunia, 2019). Pada sektor pertanian, data terakhir di awal dekade 2000, pengeluaran *research and development* Indonesia ada hampir di paling bawah negara-negara Asia lainnya, bahkan lebih rendah dari Bangladesh (Bank Dunia, 2001).

Efisiensi sektor pertanian ini penting untuk menjamin keberlanjutan sektor pertanian domestik untuk berkembang dan tidak terlibas komoditas pertanian impor yang saat ini harganya lebih rendah. Namun, mengurung diri dengan melakukan penutupan pintu impor bukanlah kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian domestik. Pemerintah harus fokus pada pekerjaan rumah di sektor pertanian yang lebih struktural daripada memilih kebijakan jangka pendek yang tidak punya dampak besar dan berkelanjutan pada kinerja sektor pertanian domestik. Pilihan kebijakannya memang tidak mudah dan tidak ringan, untuk itu diperlukan *leadership* luar biasa di sektor ini.

Leadership ini tidak hanya bermakna orang yang tepat, namun juga memiliki arti bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah tidak hanya efektif namun juga memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat terutama di sektor pertanian. Oleh karena itu, *leadership* yang efektif ini tidak hanya diperlukan di tingkat nasional namun juga di tingkat provinsi, daerah, hingga perdesaan. Ini artinya sumber daya finansial memang diperlukan untuk membiayai program pertanian di tingkat perdesaan, namun membangun *leadership* di tingkat lokal untuk menyukseskan program pertanian jauh lebih penting bagi keberhasilan intervensi bidang pertanian (Conley dan Udry, 2001; Ramirez, Bernal, Clarke, dan Hernandez, 2018; Rudnick, Niles, Lubell, dan Cramer, 2019).

Leadership ini harus didasari oleh adanya asumsi bahwa pemerintah dari mulai pusat hingga daerah telah menyusun program yang tepat dan relevan, tidak hanya dengan masalah di tingkat perdesaan namun juga tepat merespons tantangan perubahan iklim serta perubahan global. Ini juga berarti diperlukan perubahan yang bermakna dalam program pemerintah yang terkait dengan pertanian. Pada subsektor pangan yaitu padi, program sebaiknya diarahkan pada upaya peningkatan konsolidasi lahan. Mengapa demikian? Karena efisiensi adalah tujuan utamanya. Konsolidasi lahan memungkinkan untuk mengurangi biaya sewa lahan yang selama ini menjadi momok bagi tingginya biaya usaha tani padi. Melalui konsolidasi lahan, bantuan pemerintah seperti traktor dan *dryer* akan lebih efisien penggunaannya. Biaya tenaga kerja akan lebih rendah, karena mekanisasi diterapkan di lahan yang cukup luas. Ini akan berdampak besar pada penurunan biaya produksi (lihat misalnya: Hiironen dan Riekkinen, 2016).

Langkah lain yang harus dilakukan adalah menelaah kembali tujuan dan *business process* subsidi pupuk. Program ini sudah berjalan begitu lama di berbagai pemerintahan. Namun hingga saat ini belum ada yang melakukan *assessment* efektivitas dan dampaknya pada produktivitas maupun kesejahteraan petani khususnya pangan. Apakah program ini masih harus diteruskan atau diubah dengan program bantuan lainnya yang lebih diperlukan oleh petani? Studi di beberapa negara bahkan memperlihatkan subsidi tidak berkorelasi langsung dengan biaya usaha tani dan profitabilitas pertanian (lihat misalnya: Lunduka, Ricker-Gilbert, dan Fisher, 2013; Panigrahi, 2019). Tampaknya diskusi harus didorong untuk secara kritis melihat ke depan agar program-

program pertanian ini relevan menjawab tantangan maupun perubahan di pasar dan termasuk tantangan global.

Dalam aspek subsidi pupuk, hampir setiap tahun ditemukan kasus yang terkait dengan penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi. Tampaknya sudah waktunya untuk mengubah pola distribusi melalui skema yang lebih *well-targeted* seperti program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Petani dapat membeli pupuk yang diperlukannya dengan harga pasar namun pada saat yang sama memperoleh transfer dana dari pemerintah sejumlah tertentu yang berbasis individu atau lebih dikenal dengan *conditional cash transfer*. Lebih jauh lagi, perbaikan dalam *data base* petani yang berbasis nama dan alamat harus dibangun untuk memperbaiki proses yang selama ini dijalankan melalui forum Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Penyederhanaan pola subsidi poinnya; jauhi subsidi komoditas, seperti apa yang telah pemerintah ambil pelajarannya dari Bahan Bakar Minyak (BBM) premium. Ubahlah seperti pola program perlindungan sosial, karena dengan cara ini ketepatan sasaran lebih terjamin dan lebih jauh lagi *output* serta *outcome* bantuan pemerintah dapat diukur secara kuantitatif.

Sasaran strategis 2015-2019 kedua yang ditetapkan di bidang pertanian adalah peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor. Sasaran ini cukup menarik untuk ditelaah, karena sasaran ini pada saat yang sama memiliki dua tujuan yaitu mencoba mendorong ekspor produk pertanian dan di sisi lain mencoba menghilangkan ketergantungan pada impor produk pertanian. Secara teoritis tidak ada yang salah dengan kebijakan ini, namun secara praktikal bukankah sebaiknya fokus pada salah satu kebijakan saja seperti promosi ekspor. Mengapa? karena dengan strategi ini sektor pertanian Indonesia, baik itu hortikultura, perkebunan, dan mungkin pangan dapat memanfaatkan pasar yang besar di luar sana untuk membantu upaya peningkatan efisiensi sektor pertanian melalui pemanfaatan skala ekonomi. Langkah ini sebetulnya ditempuh oleh industri manufaktur Indonesia, di mana kebijakan substitusi impor yang diterapkan pada dekade 1980-an ditinggalkan dan beralih ke strategi promosi ekspor pada dekade 1990-an hingga saat ini.

Dengan tujuan utama kebijakan pertanian nasional menuju swasembada, maka dampaknya adalah relatif tingginya sumber daya fiskal yang didedikasikan untuk subsektor pangan. Di sisi lain, jika melihat pasar global, produk hasil

hortikultura, peternakan dan produk dengan nilai tambah tinggi justru yang pertumbuhannya luar biasa, bahkan *global supply chain*-nya telah terbentuk dan berkembang pesat. Di pasar internasional, permintaan untuk produk dengan nilai tambah tinggi ini tumbuh pesat. Permintaan produk hortikultura tumbuh rata-rata 5,4% selama periode 1984-2004 (Bank Dunia, 2012). Sedangkan untuk produk daging tumbuh rata-rata 5,5%. Bandingkan dengan pertumbuhan permintaan produk sereal seperti beras yang hanya tumbuh di level 2,2% pada periode yang sama.

Eksportir produk pertanian terbesar di dunia terkonsentrasi di wilayah Amerika Serikat, Amerika Latin, Asia Tenggara. Komoditas yang diekspor adalah komoditas yang memiliki nilai tambah tinggi seperti hortikultura (Levers dan Müller, 2019; MacDonald *et al.*, 2015; Reardon, Barrett, Berdegúe, dan Swinnen, 2009). Namun demikian Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih terukur untuk menjalankan kebijakan promosi ekspor terutama pada produk pertanian.

Poin yang ingin disampaikan adalah manfaatkanlah keunggulan komparatif pertanian Indonesia, buatlah prioritas komoditi untuk ekspor dan investasilah yang signifikan untuk benar-benar menjadi *international champion* pada komoditas pertanian tertentu. Ini juga berarti memberi pesan agar jangan letakkan program seperti menanam bawang putih yang sangat jelas Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif sebagai prioritas.

Apalagi ditambah dengan kebijakan mewajibkan para importir bawang putih yang notabene sebetulnya adalah para pedagang untuk mengembangkan usaha budidaya bawang putih di dalam negeri. Para pedagang yang dapat lisensi impor ini 'dipaksa' menjadi pemain baru dalam produksi bawang putih dalam negeri, sehingga penguasaan mereka terhadap komoditas satu ini menjadi semakin lengkap, menguasai impor plus produksi dalam negeri. Kebijakan ini tidak fokus, akibatnya akan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Harga produk pertanian menjadi mahal di pasar domestik, karena pada saat yang sama upaya substitusi impor disertai dengan pembatasan impor. Pada saat yang sama juga pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya 'memproduksi' komoditas yang juga bukan menjadi keunggulan komparatif

negeri ini. Tentu saja masyarakat menjadi riuh karena di saat-saat tertentu menghadapi kelangkaan pasokan dan harga yang meningkat.

Isu yang paling mendasar dan harus menjadi bagian dalam kebijakan nasional pertanian adalah kesejahteraan petani. Selama periode 2009-2019, jumlah pekerja di sektor pertanian mengalami penurunan lebih dari 7 juta orang. Banyak aspek yang dapat disampaikan berkaitan dengan penurunan jumlah pekerja. Di satu sisi, penurunan ini positif karena pekerja beralih ke sektor-sektor lain seperti industri dan jasa. Namun, pada saat yang sama penurunan jumlah pekerja juga memberikan sinyal bahwa sektor ini tidak begitu menarik sebagai sumber penghidupan.

Dari sisi upah, sektor pertanian memang tertinggal jauh jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada 2019 *gap* upah rata-rata dalam sebulan antara pekerja di sektor pertanian dan di industri hampir 72%. Ini artinya pekerja di industri pengolahan memiliki kesejahteraan jauh lebih tinggi dari pekerja di pertanian jika melihat dari sisi upah. Ini tentu bukan hanya masalah sektor pertanian namun juga sangat berkaitan dengan upaya sektor ketenagakerjaan untuk memperbaiki kondisi pekerjaan di perdesaan.

Lebih jauh, jika kesejahteraan dinilai dari nilai tukar petani, maka perkembangan sejak satu dekade terakhir memperlihatkan peningkatan secara agregat. Namun, jika dilihat lebih dalam peningkatan ini berada pada level yang sangat terbatas. Artinya akselerasinya sangat lamban dan fluktuatif dari bulan ke bulan. Langkah yang dapat diambil pemerintah adalah memperbaiki akses pasar petani sekaligus meningkatkan *linkage* antara kelompok petani dengan agroindustri, sehingga kepastian harga lebih terjamin.

Pada sisi *supply*, insentif untuk aktivitas penelitian dan pengembangan di sektor ini harus diperkenalkan untuk mendorong inovasi dan penurunan biaya produksi. Pada saat yang sama pemerintah harus dapat memastikan bahwa pasar berjalan, di mana petani dapat mengakses teknologi dan input dengan harga yang kompetitif dan sepadan dengan hasil yang akan didapatnya dari panen.

Aspek yang tidak kalah pentingnya adalah memfasilitasi petani untuk memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian termasuk di dalamnya pengetahuan tentang pasar. Pengetahuan tentang pasar yang baik akan membantu petani untuk meresponsnya dengan

melakukan penyesuaian dalam usaha taninya, seperti mengubah pendekatan dari penggunaan pupuk kimia menjadi organik atau bahkan beralih dari satu komoditas ke komoditas lainnya.

Riuh dan Sengkarut Data Produksi

Kebijakan yang tepat hanya bisa diformulasikan dengan menggunakan referensi yang tepat dan data yang valid. Indonesia mendapatkan pelajaran mengenai pentingnya data pertanian yang valid dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2016, pemerintah menetapkan kebijakan menghentikan impor beras dengan menyandarkan diri pada data produksi beras yang dinyatakan surplus dalam laporan statistik. Namun pasar memperlihatkan gejala yang lain, harga beras terus melambung tinggi di luar perilakunya di tahun sebelumnya. Gejala ini seolah memberikan pesan bahwa pasar sedang kekurangan pasokan. Riuh di media terjadi bukan hanya antara para pengamat ekonomi, namun juga antar-kementerian yang berbeda pandangan tentang keadaan di pasar beras nasional.

Akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk memperbaiki metodologi penghitungan produksi padi nasional dan dengan tegas presiden menyatakan bahwa data hanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknologi akhirnya menjadi kunci dari metode baru penghitungan produksi padi nasional. Kerja sama yang apik namun juga menantang terbentuk antara Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga menghasilkan lahan baku sawah terbaru. Berdasarkan luas lahan baku sawah yang baru tersebut, BPS menggunakannya sebagai dasar untuk menerapkan metode baru penghitungan produksi padi yaitu Kerangka Sampel Area (KSA).

Tabel 1. Perbandingan Hasil Penghitungan Produksi Padi 2018 (juta ton)

Metode	Produksi Gabah Kering	Produksi Beras	Konsumsi Beras	Surplus Beras
KSA	56,5	32,4	29,6	2,9
Ubinan	80	46,5	33,5	13
Selisih	23,5	14,1	3,9	10,1

Sumber: CNBC Indonesia, 2018.

KSA adalah langkah cerdas karena yang dibutuhkan saat ini dan ke depan tidak hanya menghitung produksi padi atau beras dalam satu tahun, namun juga mampu melakukan prognosisis dari bulan ke bulan. Ini artinya berbagai faktor di lapangan seperti perubahan iklim dapat dihitung dampaknya dapat tercermin dalam prognosisis produksi padi bulanan. Dengan cara ini pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti menyerap beras petani ketika ada perkiraan kelebihan pasokan atau sebaliknya melakukan operasi pasar ketika prognosisisnya memperlihatkan akan terjadi kekurangan pasokan di bulan tertentu. Tampaknya memperbaiki metode penghitungan komoditas lain dengan menggunakan KSA akan menjadi langkah yang tepat ke depan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Mendiskusikan sektor pertanian memang tidak mudah dan selalu menarik, bukan hanya karena 38,1 juta pekerja berada di dalamnya, namun juga karena perannya sangat penting dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Setiap pemerintah yang berkuasa pasti sangat tergoda untuk menggunakan jargon swasembada untuk pertanian dan mungkin bahkan dalam produk tertentu di industri. Namun mungkin sekarang sudah saatnya mendiskusikan kembali tujuan tersebut atau setidaknya mengkritisi dengan baik strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Swasembada tidak bermakna apa pun ketika akibatnya masyarakat harus mengaksesnya dengan harga yang sangat tinggi dan sulit dibandingkan dengan komoditas yang sama yang didatangkan dari luar negeri. Ini bukan soal nasionalisme, ini bicara tentang masih tingginya pengeluaran masyarakat miskin untuk bahan makanan. Ini juga bicara tentang bagaimana sektor pertanian bisa semakin efisien dari waktu ke waktu sehingga Indonesia dapat menjadi negeri pemasok pertanian dunia. Ini artinya kontribusi sektor ini tidak hanya dalam hal peningkatan produksi, namun juga berperan besar dalam meningkatkan efisiensi produksinya sehingga sektor ini menghasilkan beberapa komoditas unggulan yang kompetitif di pasar dalam maupun luar negeri.

Untuk itu diperlukan kebijakan inovatif, di mana sikap menyandarkan diri pada prinsip melanjutkan program pemerintahan sebelumnya harus benar-benar dikritisi kembali. Prinsip yang harus dipegang di sektor ini adalah fokus pada keunggulan komparatif dan ketahanan pangan. Keduanya harus bermuara

pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian. Impor jangan dijadikan sesuatu yang tabu jika itu dilakukan untuk komoditas yang memang Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif. Dengan fokus pada komoditas unggulan yang jumlahnya terbatas, bukan tidak mungkin dalam sepuluh tahun ke depan Indonesia jadi pemain besar baru di pasar dunia untuk komoditas tertentu.

Upaya tersebut tentu jangan hanya dibatasi menjadi tugas pemerintah semata. Pemerintah dapat membangun ekosistem melalui berbagai kebijakannya untuk mendorong sektor swasta secara produktif ikut menjadi bagian dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan insentif yang jelas dan menarik bagi pelaku bisnis di bidang pertanian. Begitu halnya dengan aktivitas penelitian dan pengembangan. Arah pengembangan komoditas yang jelas dan terarah akan membentuk pola dan intensitas aktivitas penelitian dan pengembangan. Pada aspek ini juga diperlukan insentif yang jelas agar perguruan tinggi dapat bersama dengan pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi dalam mendukung pembangunan pertanian dalam negeri.

Daftar Pustaka

- Bank Dunia. (2012). *Indonesian Agriculture Public Expenditure Review 2010*. Washington: World Bank
- Bank Dunia. (2019). *Research and Development Expenditure (% of GDP)*. 3 September 2019. <<https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=ID-TH-VN-MY>>.
- Bank Dunia. (2001). *Priority Issue for Indonesian Agriculture*. 3 September 2019. <<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769045002/Agricultural.pdf>>.
- CNB. (2019). *Perbandingan Metode Baru dan Lama dalam Estimasi Produksi Padi*.
- Albrecht, J., Navarro, L., dan Vroman, S. (2009). The Effects of Labour Market Policies in an Economy with an Informal Sector. *The Economic Journal*, 119(539), 1105-1129. <<https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2009.02268.x>>.
- Bailey, D., Driffield, N., dan Kispeter, E. (2019). Brexit, foreign investment and employment: some implications for industrial policy? *Contemporary*

- Social Science*, 14(2), 174-188. <<https://doi.org/10.1080/21582041.2019.1566563>>.
- Basu, A. K., Chau, N. H., Fields, G. S., dan Kanbur, R. (2019). Job creation in a multi-sector labour market model for developing economies. *Oxford Economic Papers*, 71(1), 119-144. <<https://doi.org/10.1093/oepl/gy029>>.
- Christiaensen, L., Demery, L., dan Kuhl, J. (2011). The (evolving) role of agriculture in poverty reduction—An empirical perspective. *Journal of Development Economics*, 96(2), 239-254. <<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.10.006>>.
- Conley, T., dan Udry, C. (2001). Social Learning Through Networks: The Adoption of New Agricultural Technologies in Ghana. *American Journal of Agricultural Economics*, 83(3), 668-673. <<https://doi.org/10.1111/0002-9092.00188>>.
- Cuadros, A., Martín-Montaner, J., dan Paniagua, J. (2019). Migration and FDI: The Role of Job Skills. *International Review of Economics & Finance*, 59, 318-332. <<https://doi.org/10.1016/J.IREF.2018.09.007>>.
- de Hoyos, R. E., dan Medvedev, D. (2011). Poverty Effects of Higher Food Prices: A Global Perspective. *Review of Development Economics*, 15(3), 387-402. <<https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2011.00615.x>>.
- de Pee, S., Brinkman, H.-J., Webb, P., Godfrey, S., Darnton-Hill, I., Alderman, H., Bloem, M. W. (2010). How to Ensure Nutrition Security in the Global Economic Crisis to Protect and Enhance Development of Young Children and Our Common Future. *The Journal of Nutrition*, 140(1), 138S-142S. <<https://doi.org/10.3945/jn.109.112151>>.
- Hamilton-Hart, N. (2019). Indonesia's Quest for Food Self-sufficiency: A New Agricultural Political Economy? *Journal of Contemporary Asia*, 1-25. <<https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1617890>>.
- Hiironen, J., dan Riekkinen, K. (2016). Agricultural Impacts and Profitability of Land Consolidations. *Land Use Policy*, 55, 309-317. <<https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2016.04.018>>.
- Hudson, S., dan Ritchie, J. R. B. (n.d.). *Film Tourism and Destination Marketing: The case of Captain Corelli's Mandolin*. <<https://doi.org/10.1177/1356766706064619>>.

- Ivanic, M., dan Martin, W. (2008). Implications of higher global food prices for poverty in low-income countries¹. *Agricultural Economics*, 39, 405-416. <<https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2008.00347.x>>.
- Jia, N.-S., Han, Y.-H., Peng, K.-M., dan Lei, H.-Z. (2019). Does Outward Foreign Direct Investment Boost Employment in the Home Country? Evidence from China's Microlevel Data. *Emerging Markets Finance and Trade*, 1-18. <<https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1601550>>.
- Kanbur, R., Christiaensen, L., dan De Weerd, J. (2019). Where to Create Jobs to Reduce Poverty: Cities or Towns? *The Journal of Economic Inequality*, 1-22. <<https://doi.org/10.1007/s10888-019-09419-5>>.
- Levers, C., dan Müller, D. (2019). Mapping Export-Oriented Crop Production. In *Telecoupling* (pp. 89-113). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-11105-2_5>.
- Lunduka, R., Ricker-Gilbert, J., dan Fisher, M. (2013). What are the farm-level impacts of Malawi's farm input subsidy program? A critical review. *Agricultural Economics*, 44(6), 563-579. <<https://doi.org/10.1111/agec.12074>>.
- MacDonald, G. K., Brauman, K. A., Sun, S., Carlson, K. M., Cassidy, E. S., Gerber, J. S., dan West, P. C. (2015). Rethinking Agricultural Trade Relationships in an Era of Globalization. *BioScience*, 65(3), 275-289. <<https://doi.org/10.1093/biosci/biu225>>.
- McCulloch*, N. (2008). Rice Prices and Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 45-64. <<https://doi.org/10.1080/00074910802001579>>.
- Ngo, c Q. (2019). Distributional Effects of Foreign Direct Investment on Poverty: the case of Vietnam. *International Journal of Trade and Global Markets*, 12(1), 43. <<https://doi.org/10.1504/IJTGM.2019.097909>>.
- Panigrahi, R. (2019). Economics of Subsidies in a Welfare State: Dynamics of Populist Policies and Farm Profitability. *Global Business Review*, 097215091881690. <<https://doi.org/10.1177/0972150918816902>>.
- Ramirez, M., Bernal, P., Clarke, I., dan Hernandez, I. (2018). The role of social networks in the inclusion of small-scale producers in agri-food developing clusters. *Food Policy*, 77, 59-70. <<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.04.005>>.

- Reardon, T., Barrett, C. B., Berdegué, J. A., dan Swinnen, J. F. M. (2009). Agrifood Industry Transformation and Small Farmers in Developing Countries. *World Development*, 37(11), 1717-1727. <<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.08.023>>.
- Rudnick, J., Niles, M., Lubell, M., dan Cramer, L. (2019). A comparative analysis of governance and leadership in agricultural development policy networks. *World Development*, 117, 112-126.<<https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2018.12.015>>.
- Skoufias, E., Tiwari, S., dan Zaman, H. (2012). Crises, Food Prices, and the Income Elasticity of Micronutrients: Estimates from Indonesia. *The World Bank Economic Review*, 26(3), 415-442.< <https://doi.org/10.1093/wber/lhr054>>.
- Warr, P., dan Yusuf, A. A. (2014). World Food Prices and Poverty in Indonesia. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 58(1), 1-21. <<https://doi.org/10.1111/1467-8489.12015>>.

Tentang Penulis

AHMAD ERANI YUSTIKA



Lahir di Ponorogo (1973). Menyelesaikan gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya, 1996. Setelah lulus aktif mempublikasikan tulisan diberbagai media massa (sekitar 750 artikel telah diterbitkan di koran/majalah nasional) dan jurnal ilmiah. Juga telah membuat sekitar 30 buku. Di samping itu, telah mempresentasikan *paper* dalam forum-forum seminar nasional maupun internasional. Pada 2001 menuntaskan studi *postgraduate* (MSc) dan 2005 menyelesaikan studi doktoral (Ph.D.), semuanya di University of Göttingen (*Georg-August-Universität Göttingen*), Jerman (melalui beasiswa GTZ dan DAAD), dengan spesialisasi Ekonomi Kelembagaan.

Sejak 1997 bekerja sebagai dosen di kampus almamater dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya (2007-2009) dan Pembantu Dekan I (Akademik) pada 2009-2010. Di luar itu, 2008-2015 mengemban amanah sebagai Direktur Eksekutif INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*), Jakarta. Sejak 2010-2017 menjadi Anggota BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia), serta menjadi Ketua *Focus Group* Infrastruktur Pengurus Pusat ISEI (2012-2015) dan Ketua *Focus Group* Ekonomi Kreatif PP ISEI (2016-2019). Pada 2006 dan 2009 terpilih sebagai Dosen Berprestasi I Universitas Brawijaya (dan dosen berprestasi tingkat nasional) dan 2007 terpilih sebagai penulis buku paling produktif di Fakultas Ekonomi-Universitas

Brawijaya. Mulai 1 Juni 2010 diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (pengukuhan dilakukan pada 30 Desember 2010). Periode 2011-2017 menjabat sebagai anggota Dewan Nasional FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Pada 2015-2017 menjadi Dirjen PPMD (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan 2017-2018 menjadi Dirjen PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Pada 2018-2019 menjadi Staf Khusus Presiden (bidang ekonomi). Saat ini menjabat Ketum Umum IKA UB (Ikatan Alumni Universitas Brawijaya) periode 2019-2023.

UNGGUL HERIQBALDI



Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di FE Universitas Gadjah Mada tahun 1997. Pendidikan S2 dan S3 diselesaikan di Monash University (2002) dan Universitas Brawijaya (2012). Sejak tahun 2000 bergabung sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya dengan spesialisasi bidang ekonomi internasional dan pembangunan. Beberapa pengalaman penelitian dan konsultasi bersama dengan mitra seperti Bank Dunia, *International Labor Organization* (ILO), *International Budget Partnership* (IBP) dan institusi lainnya.

Penerima beasiswa *Australian Development Scholarship* (ADS) (2000-2002) dan pernah menjabat sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu, Universitas Airlangga (2014-2015) dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga (2013-2014). Pengalaman terakhir sebagai *Senior Economic Advisor* pada Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (2015-2018).

MOHAMMAD REZA HAFIZ AKBAR



Menyelesaikan studi sarjananya di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya (2009-2013). Pada saat menjadi mahasiswa, Reza aktif di BEM Fakultas Ekonomi dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sejak 2014 hingga sekarang menjadi peneliti di *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF).

MUTIARA ALAM ADDINI



Pekerja profesional di bidang ekonomi pembangunan dengan pengalaman di bidang *advisory*, manajemen proyek dan riset *impact evaluation* di Asia Tenggara. Pengalaman riset mencakup bidang pengembangan UMKM, ekonomi pembangunan, pertanian, dan intervensi sanitasi; serta memiliki pengalaman bekerja tidak hanya di Indonesia, namun juga Amerika Serikat dan Kamboja. Sebelumnya bekerja sebagai *Research Associate* di *Center of Education and the Workforce* di *Georgetown University*, *Graduate Fellow* di *Causal Design Cambodia* serta Staf SMIDeP-JICA Indonesia. Mutiara juga merupakan *Social Innovation Fellow* di *Starting Bloc*, Amerika Serikat. Menempuh pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar *Master of International Development Policy* dari *Georgetown University*, Amerika Serikat.

ABDUL MANAP PULUNGAN



Abdul Manap Pulungan, dilahirkan di Padangsidempuan, 27 Juli 1984. Menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2006 dan Maggister Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) di Universitas Indonesia tahun 2014. Sejak 2008 hingga kini bergabung di *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef). Sejumlah tulisan telah dipublikasi di media cetak seperti *Investor Daily*, *Bisnis Indonesia*, *Koran Kontan*, *the Jakarta Post*, *Media Indonesia*, dan *Republika*.

DITA NURUL AINI



Menyelesaikan studi S1 Ekonomi Pembangunan pada 2011 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Menyelesaikan pendidikan magister Ilmu Ekonomi di universitas yang sama pada tahun 2015. Berpengalaman menjadi asisten dosen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang sampai 2016. Selain itu juga pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sampai 2018. Saat ini aktif sebagai Tenaga Pengajar Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nasional Jakarta dan juga peneliti pada lembaga penelitian ECORIST Malang dan INSTEP Jakarta.

DWINDA RAHMAN



Dwindi Rahman. Asal Padang, Sumatera Barat. Menamatkan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Jurusan Akuntansi tahun 2013. Sejak jadi mahasiswa aktif dalam kegiatan intra dan ekstra kampus. Pernah bekerja di KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (Kreston International). Setelah itu, bekerja menjadi Tenaga Ahli di Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi. Beberapa tulisan telah diterbitkan di media cetak atau *online*.

RIYANDI SARAS ANGGITA



Lahir di Jakarta, 14 Januari 1993. Saat ini aktif menjabat sebagai konsultan di PT. Sarana Multi Infrastruktur Indonesia. Telah menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2015 dan pascasarjana pada bidang *Economics and Econometrics* di *University of Nottingham* tahun 2017 dengan beasiswa *British Chevening Scholarship*.

Sebelumnya bergabung sebagai Tenaga Ahli Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan pembantu asisten Staf Khusus Presiden di bidang ekonomi.

FAJAR B. HIRAWAN



Saat ini aktif berkarya sebagai Peneliti di Departemen Ekonomi, *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) Jakarta, Indonesia, sejak November 2006. Selain itu, beliau aktif sebagai Faculty Member di Sekolah Kepemerintahan dan Kebijakan Publik Indonesia (*School of Government and Public Policy* (SGPP)). Fajar memiliki banyak pengalaman penelitian dan pengajaran, khususnya terkait topik yang berhubungan dengan ekonomi makro, ketahanan pangan, ekonomi digital, UMKM, sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan isu pembangunan ekonomi lainnya di Indonesia.

Selama perjalanan karirnya, Fajar juga sangat aktif menjadi konsultan di beberapa lembaga pemerintahan dan swasta. Di masa akhir pemerintahan Jokowi, beliau mendapatkan kesempatan menjadi Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi (Juli 2018-Oktober 2019). Beliau aktif memberikan perspektifnya kepada awak media, baik cetak maupun elektronik, dari dalam maupun luar negeri. Beberapa artikel atau tulisan juga sudah banyak diterbitkan, baik dalam bentuk laporan penelitian, jurnal, dan masih banyak lagi.

Beliau menyelesaikan studi S1 di bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) di tahun 2006 dan studi S2 di bidang Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas di Roma “La Sapienza,” Italia di tahun 2009. Fajar memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi di *School of Economics, University of Sydney, Australia* di tahun 2017.

DHENNY YUARTHA JUNIFTA



Alumnus universitas Brawijaya. Sejak Mahasiswa, Dhenny telah aktif di dunia riset dan organisasi. Mantan Sekretaris Umum Himpunan mahasiswa Islam (HMI) komisi ekonomi dan bisnis, pernah menjadi asisten peneliti di Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (PKEPK) FEB-UB di tahun 2014. Memenangkan beberapa penghargaan riset di level nasional. Spesialisasi dan minat dalam ekonomi politik internasional. Menyusun tugas akhir dengan judul “Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Upaya Integrasi Ekonomi Asia Pasifik dan kompetisi Negara Hegemon ekonomi”.

Pada akhir Tahun 2016, bergabung menjadi asisten peneliti di *Institute for Development of economics and Finance (INDEF)*, dan peneliti muda hingga kini. Selain aktif di INDEF, tahun 2017-2018 pernah bertugas di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT). Sejak 2018 hingga sekarang aktif sebagai Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden. Aktif menulis artikel di media masa regional maupun nasional.

MUHAMMAD MAULANA



Meraih gelar *Master of Public Policy* dari *Flinders University-Australia* pada 2016 dengan thesis berjudul ‘Politik Penganggaran Kesehatan di Indonesia’. Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Cabang Australia Selatan periode 2015-2016. Peneliti kebijakan dan tata kelola anggaran publik sejak 2007 hingga 2014 di Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi

Anggaran). Pada 2018, bersama sejumlah pegiat aktivis anggaran mendirikan Perkumpulan *Policy Reform Initiatives and Democracy* (PRIDE).

HANS ARYAGUNA ABADI



American Student Union (AASU) dan Persatuan Mahasiswa Indonesia Seluruh Amerika Serikat (PERMIAS).

Hans Aryaguna Abadi, lahir di Bandung, Indonesia. Menyelesaikan studi SMA di *United World College Changhsu*, China dan saat ini aktif sebagai mahasiswa S1 di bidang Keuangan dan Ekonomi di *University of Florida*, Amerika Serikat. Penerima beasiswa Davis World Scholar. Mempunyai pengalaman magang di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (2019). Saat ini aktif sebagai anggota organisasi kemahasiswaan

HARIANI DWI ANDARI



Oktober 2019 bergabung di Kementerian Sekretariat Negara sebagai Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden.

Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Ilmu Komunikasi di Fakultas Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tahun 2015. Tahun 2016-2018 bergabung sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kemudian tahun 2018-